



International
Labour
Organization

► ILO Flagship Report

► Laporan Perlindungan Sosial Dunia 2020–22



Perlindungan
Sosial di
Persimpangan
Jalan - Mengejar
masa depan yang
lebih baik

Ringkasan Eksekutif

Kendati ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dalam memperluas perlindungan sosial di banyak belahan dunia, saat pandemi COVID-19 melanda banyak negara menghadapi tantangan yang signifikan dalam mewujudkan hak asasi manusia atas jaminan sosial untuk semua. Laporan ini memberikan gambaran global tentang kemajuan yang dicapai di seluruh dunia selama dasawarsa terakhir dalam memperluas perlindungan sosial dan membangun sistem perlindungan sosial berbasis hak, termasuk perlindungan dasar, dan mencakup dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, ini memberikan kontribusi penting untuk kerangka pemantauan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Lima pesan yang muncul dari laporan ini:

Pandemi telah menguak ketimpangan yang mendalam dan kesenjangan yang signifikan dalam cakupan, kelengkapan dan kecukupan perlindungan sosial di semua negara. Tantangan yang meluas seperti tingkat ketiadaan jaminan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang terus ada, meningkatnya ketimpangan, informalitas yang luas dan kontrak sosial yang rapuh telah diperburuk oleh COVID-19. Krisis ini juga telah mengungkap kerentanan miliaran orang yang terlihat dapat bertahan dengan relatif baik namun tidak terlindungi secara memadai dari gelombang kejutan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Dampak sosial-ekonomi pandemi telah membuat pembuat kebijakan sulit untuk mengabaikan sejumlah kelompok populasi – termasuk anak-anak, orang tua, pengasuh yang tidak dibayar, serta perempuan dan laki-laki yang bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan dan di perekonomian informal – yang tidak tercakup secara memadai atau bahkan tidak tercakup sama sekali oleh langkah-langkah perlindungan sosial yang ada. Dalam menyingkap kesenjangan ini, laporan menunjukkan bahwa pandemi telah mendorong negara-negara ke dalam tindakan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan perlindungan sosial di garis depan.

COVID-19 memicu respons kebijakan perlindungan sosial yang tak tertandingi. Pemerintah-pemerintah telah menyusun perlindungan sosial sebagai respons garis depan untuk melindungi kesehatan, pekerjaan dan pendapatan masyarakat, serta demi memastikan stabilitas sosial.

Di mana diperlukan, pemerintah-pemerintah juga telah memperluas cakupan ke kelompok yang belum terlindungi, meningkatkan tingkat manfaat atau memperkenalkan manfaat-manfaat baru, mengadaptasi mekanisme administrasi dan penyediaan, serta memobilisasi sumber daya keuangan tambahan.

Namun, terlepas dari beberapa dukungan internasional, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah telah berjuang untuk meningkatkan perlindungan sosial dan respons stimulus yang proporsional dalam rangka mengatasi dampak buruk pandemi seperti yang dapat dilakukan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, yang mengarah kepada “kesenjangan stimulus” yang sebagian besar timbul dari cakupan yang signifikan dan dari kesenjangan pembiayaan.

Pemulihan sosial-ekonomi tetap tidak pasti dan peningkatan belanja perlindungan sosial akan terus menjadi penting. Perkiraan IMF terbaru memperingatkan pemulihan yang berbeda, di mana negara-negara kaya menikmati pemulihan ekonomi yang cepat sementara negara-negara berpenghasilan rendah melihat sebaliknya dari raihan pembangunan mereka baru-baru ini. Memastikan pemulihan yang berpusat pada manusia bergantung pada akses yang adil terhadap vaksin. Ini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan kesehatan masyarakat: jurang yang dalam dalam ketersediaan vaksin akan melepaskan mutasi virus baru yang merusak manfaat kesehatan masyarakat dari vaksin di mana-mana. Namun, akses vaksin yang tidak adil, kesenjangan stimulus yang menganga terlihat dalam respons krisis, seruan yang tidak terpenuhi untuk solidaritas global, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, dan bantuan darurat hingga pengetatan ikat pinggang menunjukkan prospek pemulihan yang tidak merata. Skenario seperti itu akan membuat banyak orang berjuang sendiri-sendiri dan menggagalkan kemajuan yang dicapai menuju pencapaian Agenda 2030 dan realisasi keadilan sosial.

Negara-negara sedang berada di persimpangan jalan terkait dengan lintasan sistem perlindungan sosial mereka. Jika ada hikmah di balik krisis ini, itu adalah pengingat kuat yang diberikannya tentang pentingnya berinvestasi dalam perlindungan sosial; namun banyak negara juga menghadapi kendala fiskal yang signifikan.

Laporan ini menunjukkan bahwa hampir semua negara, terlepas dari tingkat pembangunannya, memiliki pilihan: apakah akan mengejar strategi investasi “jalan atas” dalam memperkuat sistem perlindungan sosial mereka atau strategi penyediaan minimalis “jalan rendah”, mengalah terhadap tekanan fiskal atau politik. Negara-negara dapat menggunakan jendela kebijakan yang dibuka oleh pandemi dan membangun langkah-langkah respons krisis mereka untuk memperkuat sistem perlindungan sosial mereka dan secara progresif menutup kesenjangan perlindungan demi memastikan bahwa setiap orang terlindungi dari guncangan sistemik dan risiko siklus kehidupan yang biasa. Ini akan melibatkan peningkatan upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang universal, komprehensif, memadai dan berkelanjutan, termasuk landasan perlindungan sosial yang kokoh yang menjamin setidaknya tingkat dasar jaminan sosial sepanjang hidup mereka. Alternatifnya adalah menyetujui pendekatan jalan rendah yang gagal berinvestasi dalam perlindungan sosial, sehingga menjebak negara-negara dalam lintasan “berbiaya rendah - pembangunan manusia rendah”. Ini akan menandai kemungkinan hilangnya penguatan sistem perlindungan sosial dan mengkonfigurasi ulang masyarakat untuk masa depan yang lebih baik.

Membangun perlindungan sosial universal dan mewujudkan hak asasi manusia atas jaminan sosial untuk semua adalah landasan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memperoleh keadilan sosial.

Melakukan hal tersebut dapat berkontribusi untuk mencegah kemiskinan dan mengatasi ketimpangan, meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia, mendorong martabat, solidaritas dan keadilan, serta menghidupkan kembali kontrak sosial.

► Status perlindungan sosial: Ada kemajuan, tetapi belum memadai

Pada 2020, hanya 46,9 persen dari populasi global yang secara efektif tercakup oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial¹ (indikator SDG 1.3.1; lihat gambar 1), sedangkan 53,1 persen sisanya – sebanyak 4,1 miliar orang – sepenuhnya tidak terlindungi. Di balik rata-rata global ini, terdapat ketimpangan yang signifikan di seluruh dan di dalam kawasan-kawasan ini, dengan tingkat cakupan di Eropa dan Asia Tengah (83,9 persen) dan Amerika (64,3 persen) di atas rata-rata global, sementara Asia dan Pasifik (44,1 persen), negara-negara Arab (40,0 persen) dan Afrika (17,4 persen) memiliki kesenjangan cakupan yang jauh lebih besar.

Akses ke tunjangan kesehatan, sakit dan kehilangan pekerjaan telah menjadi sangat relevan selama pandemi. Sementara hampir dua pertiga dari populasi global dilindungi oleh semacam skema kesehatan, masih terdapat kesenjangan dalam cakupan dan kecukupan perlindungan. Ketika berbicara tentang perlindungan pendapatan selama sakit dan kehilangan pekerjaan, kesenjangan cakupan dan kecukupan menjadi semakin jelas. Kira-kira sepertiga penduduk usia kerja memiliki jaminan pendapatan yang dilindungi undang-undang jika sakit, dan kurang dari seperlima pekerja yang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia benar-benar menerima tunjangan kehilangan pekerjaan.

Kesenjangan dalam cakupan, kelengkapan dan kecukupan sistem perlindungan sosial dikaitkan dengan kurangnya investasi yang signifikan dalam perlindungan sosial, khususnya di Afrika, Negara-negara Arab dan Asia. Negara-negara menghabiskan rata-rata 12,9 persen dari PDB mereka untuk perlindungan sosial, (tidak termasuk kesehatan), tetapi angka ini menutupi perbedaan variasi yang mengejutkan.

Negara-negara berpenghasilan tinggi membelanjakan rata-rata 16,4 persen, atau dua kali lebih banyak dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (yang membelanjakan 8 persen), enam kali lipat dari negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (2,5 persen), dan 15 kali lipat dari negara-negara berpenghasilan rendah (1,1 persen).

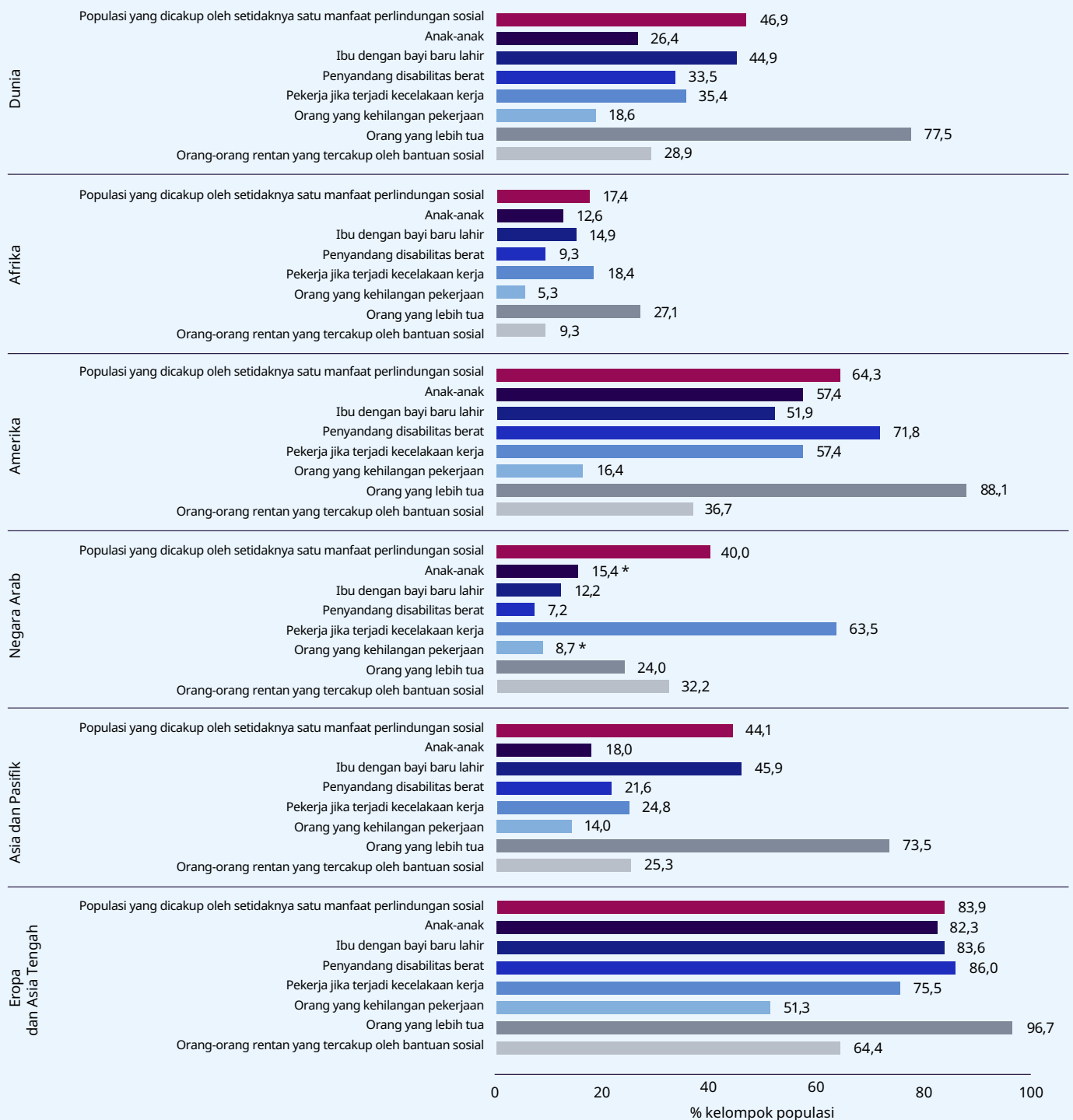
Kesenjangan pembiayaan untuk membangun landasan perlindungan sosial ini telah melebar sekitar 30 persen dari sejak awal krisis COVID-19, karena meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan, langkah-langkah jaminan pendapatan, dan pengurangan PDB yang disebabkan oleh krisis. Untuk menjamin setidaknya tingkat dasar jaminan sosial melalui landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional, negara-negara berpenghasilan menengah-bawah perlu menginvestasikan tambahan US\$362,9 miliar dan negara-negara berpenghasilan menengah-atas harus menambah US\$750,8 miliar per tahun, setara dengan 5,1 dan 3,1 persen dari PDB masing-masing untuk kedua kelompok. Negara-negara berpenghasilan rendah perlu menginvestasikan tambahan US\$77,9 miliar, setara dengan 15,9 persen dari PDB mereka.

COVID-19 memberikan ancaman berbahaya pada kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), membalikkan pencapaian dalam pengentasan kemiskinan. Ini juga menyingkap kesenjangan perlindungan yang sudah ada sebelumnya di semua negara dan membuat pembuat kebijakan tidak mungkin mengabaikan defisit perlindungan sosial yang terus-menerus dialami oleh kelompok tertentu, seperti pekerja informal, migran dan pekerja perawatan yang tidak dibayar.

¹ Di luar manfaat perawatan kesehatan dan sakit.

Krisis ini telah menghasilkan respons perlindungan sosial global yang belum pernah terjadi sebelumnya namun masih belum merata. Negara-negara berpenghasilan lebih tinggi berada di tempat yang lebih baik dalam memobilisasi sistem yang ada pada mereka atau memperkenalkan langkah-langkah darurat baru untuk mengatasi dampak krisis terhadap kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan. Menetapkan tanggapan lebih sulit dilakukan dalam konteks negara-negara berpenghasilan rendah, yang sangat tidak siap dan memiliki lebih sedikit ruang untuk manuver kebijakan, terutama dalam kebijakan makroekonomi.

► **Gambar 1. Indikator SDG 1.3.1: Cakupan perlindungan sosial yang efektif, estimasi global dan regional, menurut kelompok populasi, 2020 atau tahun terakhir yang tersedia**



*Untuk ditafsirkan dengan hati-hati: estimasi berdasarkan cakupan data yang dilaporkan di bawah 40% dari populasi.

Catatan: Lihat Lampiran 2 untuk penjelasan metodologis. Agregat global dan regional ditimbang berdasarkan

Sumber: ILO, Database Perlindungan Sosial Dunia, berdasarkan Penyelidikan Jaminan Sosial; ILOSTAT; sumber-sumber nasional

► Perlindungan sosial untuk anak-anak masih terbatas, namun sangat penting untuk menyingkap potensinya

Sorotan

- Sebagian besar anak-anak masih belum memiliki cakupan perlindungan sosial yang efektif, dan hanya 26,4 persen anak di dunia yang telah menerima manfaat perlindungan sosial. Cakupan efektifnya sangat rendah di beberapa wilayah: 18 persen di Asia dan Pasifik, 15,4 persen di Negara-negara Arab dan 12,6 persen di Afrika.
- Perkembangan positif baru-baru ini termasuk penerapan tunjangan anak universal atau kuasi-universal di beberapa negara, dan kesadaran baru dalam konteks COVID-19 tentang pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif, layanan pengasuhan anak yang berkualitas dan kebutuhan akan perlindungan sosial bagi pengasuh.
- Rata-rata, belanja nasional untuk perlindungan sosial bagi anak-anak terlalu rendah, hanya setara dengan 1,1 persen dari PDB, dibandingkan dengan 7 persen dari PDB yang dihabiskan untuk pensiun. Kawasan-kawasan di dunia dengan jumlah anak terbesar dalam populasi, dan kebutuhan terbesar akan perlindungan sosial, memiliki cakupan dan tingkat pengeluaran terendah, terutama Afrika sub-Sahara (0,4 persen dari PDB).
- Untuk mengatasi peningkatan dramatis dalam kemiskinan anak yang disebabkan oleh COVID-19, menutup celah cakupan perlindungan sosial dan memberikan hasil terbaik bagi anak-anak dan masyarakat, pembuat kebijakan harus menerapkan pendekatan sistem terintegrasi termasuk dalam manfaat-manfaat untuk anak dan layanan pengasuhan anak, pemberian cuti orang tua dan akses ke perawatan kesehatan.

► Perlindungan sosial bagi perempuan dan laki-laki usia kerja memberikan perlindungan yang belum memadai terhadap risiko utama

Sorotan

- *Maternitas*: Beberapa negara telah membuat kemajuan yang menentukan menuju cakupan maternitas efektif yang universal atau mendekati universal. Terlepas dari dampak perkembangan positif dukungan yang diberikan kepada perempuan yang melahirkan anak, namun hanya 44,9 persen perempuan dengan bayi baru lahir di seluruh dunia yang menerima tunjangan kehamilan tunai.
- *Sakit*: Krisis telah menunjukkan pentingnya memastikan jaminan pendapatan selama sakit, termasuk karantina. Namun, hanya sepertiga dari populasi usia kerja dunia yang memiliki jaminan pendapatan yang dilindungi oleh hukum pada saat sakit.
- *Disabilitas*: Jumlah penyandang disabilitas berat di seluruh dunia yang menerima tunjangan disabilitas tetap rendah, yaitu 33,5 persen. Hal pentingnya adalah beberapa negara saat ini telah memiliki program tunjangan disabilitas universal.

- ▶ *Kecelakaan kerja*: Hanya 35,4 persen angkatan kerja global yang memiliki akses efektif ke perlindungan kecelakaan kerja. Banyak negara telah mengakui COVID-19 sebagai kecelakaan kerja untuk memastikan akses yang lebih mudah dan lebih cepat ke manfaat terkait di bawah sistem asuransi kecelakaan kerja, khususnya bagi pekerja di sektor yang paling terpapar.
- ▶ *Perlindungan pengangguran*: Hanya 18,6 persen pekerja yang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia memiliki cakupan efektif untuk jaminan kehilangan pekerjaan dan, karenanya, benar-benar menerima tunjangan kehilangan pekerjaan. Tunjangan ini masih menjadi cabang perlindungan sosial yang paling kurang berkembang. Namun, pandemi telah menyoroti peran penting skema perlindungan kehilangan pekerjaan untuk melindungi pekerja dan pendapatan, melalui skema retensi pekerjaan dan tunjangan kehilangan pekerjaan.
- ▶ *Estimasi belanja negara* menunjukkan bahwa di seluruh dunia hanya 3,6 persen dari PDB yang dihabiskan untuk perlindungan sosial publik dalam memastikan jaminan pendapatan bagi orang-orang usia kerja.

► **Perlindungan sosial bagi perempuan dan laki-laki lanjut usia masih menjadi tantangan dalam cakupan dan kecukupan**

Sorotan

- Pensiun untuk perempuan dan laki-laki usia lanjut adalah bentuk perlindungan sosial yang paling luas di dunia, dan merupakan elemen kunci dalam mencapai target SDG 1.3. Secara global, 77,5 persen orang di atas usia pensiun menerima beberapa bentuk pensiun hari tua. Namun, kesenjangan besar tetap ada di seluruh wilayah, di antara daerah pedesaan dan perkotaan, dan antara perempuan dan laki-laki. Belanja negara untuk pensiun dan tunjangan lain bagi lansia menyumbang rata-rata 7,0 persen dari PDB, sekali lagi dengan variasi besar di seluruh wilayah.
- Kemajuan yang signifikan telah dicapai terkait dengan perluasan cakupan sistem pensiun di negara-negara berkembang. Yang lebih menggembirakan lagi, di berbagai negara, termasuk negara berpenghasilan menengah ke bawah, pensiun universal telah dikembangkan sebagai bagian dari landasan perlindungan sosial nasional.
- Krisis COVID-19 telah membawakan tekanan tambahan dalam tanggungan biaya dan pembiayaan sistem pensiun, tetapi dampaknya dalam jangka panjang akan moderat hingga rendah.
- Tanggapan besar-besaran negara-negara terhadap krisis telah menyoroti peran penting yang dimainkan oleh sistem perlindungan hari tua, termasuk perawatan jangka panjang, dalam memastikan perlindungan lansia dewasa, terutama pada saat krisis, dan urgensi untuk memperkuat perawatan jangka panjang, termasuk sistem untuk melindungi hak-hak penerima perawatan dan hak-hak pekerja perawatan pada saat yang sama.
- Reformasi pensiun telah didominasi oleh penekanan pada kesinambungan fiskal, dengan mengorbankan prinsip-prinsip lain yang ditetapkan oleh standar jaminan sosial internasional, seperti keuniversalan, kecukupan dan prediktabilitas manfaat, solidaritas dan pembiayaan kolektif. Ini sangat penting untuk menjamin keamanan pendapatan lansia, yang merupakan dan harus tetap menjadi tujuan utama dari setiap sistem pensiun. Memastikan kecukupan tunjangan sangat penting bagi perempuan, orang-orang dengan pekerjaan bergaji rendah dan mereka yang berada dalam bentuk pekerjaan rentan. Selain itu, banyak negara di dunia masih berjuang untuk memperluas dan membiayai sistem pensiun mereka; negara-negara ini menghadapi hambatan struktural, di antaranya, terkait dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah, tingkat informalitas yang tinggi, kapasitas iuran yang rendah, kemiskinan dan ruang fiskal yang tidak memadai.

► **Perlindungan kesehatan sosial: sebuah kontribusi penting untuk cakupan kesehatan universal**

Sorotan

- Kemajuan signifikan telah dicapai dalam meningkatkan cakupan populasi, dengan hampir dua pertiga populasi global dilindungi oleh suatu skema. Namun, hambatan untuk mengakses layanan kesehatan tetap berupa pembayaran yang ditanggung sendiri untuk layanan kesehatan, jarak fisik, keterbatasan jangkauan, kualitas dan penerimaan layanan kesehatan, waktu tunggu yang lama, serta biaya peluang yang disebabkan hilangnya waktu kerja. Krisis COVID-19 telah menyoroti keterbatasan kecukupan manfaat dan kebutuhan untuk mengurangi pembayaran yang ditanggung sendiri.
- Pembiayaan kolektif, pengumpulan risiko yang luas dan manfaat berbasis hak adalah syarat utama untuk mendukung akses yang efektif ke perawatan kesehatan bagi semua dengan cara yang tanggap terhadap guncangan. Prinsip-prinsip yang diberikan oleh standar jaminan sosial internasional lebih relevan dari sebelumnya dalam menuju ke cakupan kesehatan semesta, dan khususnya dalam konteks kesehatan masyarakat saat ini. Data yang lebih banyak dan lebih baik tentang cakupan hukum perlu dikumpulkan sebagai prioritas untuk memantau kemajuan cakupan dan kesetaraan.
- Berinvestasi dalam ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting. Pandemi COVID-19 semakin menyingkap kebutuhan untuk berinvestasi dalam layanan kesehatan dan untuk meningkatkan koordinasi dalam sistem kesehatan. Pandemi ini mendorong perhatian pada tantangan yang dihadapi dalam merekrut, mengerahkan, mempertahankan, dan melindungi pekerja kesehatan yang terlatih, didukung, dan termotivasi untuk memastikan pemberian layanan kesehatan yang berkualitas.
- Keterkaitan yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik di antara mekanisme untuk mengakses perawatan kesehatan dan jaminan pendapatan diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor penentu utama kesehatan secara lebih efektif. Krisis COVID-19 semakin menekankan peran sistem perlindungan sosial dalam membentuk perilaku untuk mendorong pencegahan dan skema tunjangan kesehatan dan penyakit yang saling melengkapi. Pendekatan terkoordinasi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan kebutuhan khusus dan kebutuhan yang muncul, termasuk mobilitas orang, meningkatnya beban penyakit kronis dan berkepanjangan, dan penuaan populasi. Dampak COVID-19 pada orang lanjut usia telah menjelaskan perlunya koordinasi antara perawatan kesehatan dan sosial.

► Mengambil jalan atas menuju perlindungan sosial universal demi masa depan yang adil secara sosial

COVID-19 semakin menggarisbawahi pentingnya pencapaian perlindungan sosial universal. Adalah penting bahwa negara – pemerintah, mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya – saat ini untuk menahan tekanan agar tidak mundur ke jalur rendah dan bahwa mereka mengejar strategi perlindungan sosial jalan atas untuk menghadapi pandemi yang sedang berlangsung, dan untuk menjamin pemulihan yang berpusat pada manusia dan masa depan yang inklusif. Untuk tujuan ini, beberapa prioritas dapat diidentifikasi.

- Langkah-langkah perlindungan sosial COVID-19 harus tetap dipertahankan hingga krisis mereda dan pemulihan berjalan dengan baik. Ini akan membutuhkan investasi berkelanjutan dalam sistem perlindungan sosial untuk mempertahankan standar hidup, memastikan akses vaksin dan perawatan kesehatan yang adil, dan mencegah kontraksi ekonomi lebih lanjut. Memastikan akses yang adil dan tepat waktu ke vaksin sangat penting untuk kesehatan dan kemakmuran semua negara dan masyarakat. Di dunia yang saling terhubung, pemulihan yang benar-benar inklusif bergantung pada hal ini.
- Godaan untuk kembali ke konsolidasi fiskal dalam membayar pengeluaran publik besar-besaran yang dibutuhkan oleh COVID-19 harus dihindari. Krisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa penghematan meninggalkan bekas luka sosial yang dalam, melukai mereka yang paling rentan di masyarakat. Sebaliknya, berjuang untuk pemulihan yang kaya lapangan kerja dan berpusat pada manusia, selaras dengan tujuan kesehatan, sosial, lingkungan dan perubahan iklim, dapat berkontribusi pada jaminan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan tujuan kohesi sosial, memperluas basis pajak dan membantu membiayai perlindungan sosial universal.
- Di tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi, ada secercah harapan bahwa pola pikir telah berubah. Dengan mengungkap kerentanan yang melekat pada setiap orang – menjadikannya terang benderang bahwa kesejahteraan perorangan kita saling terkait erat

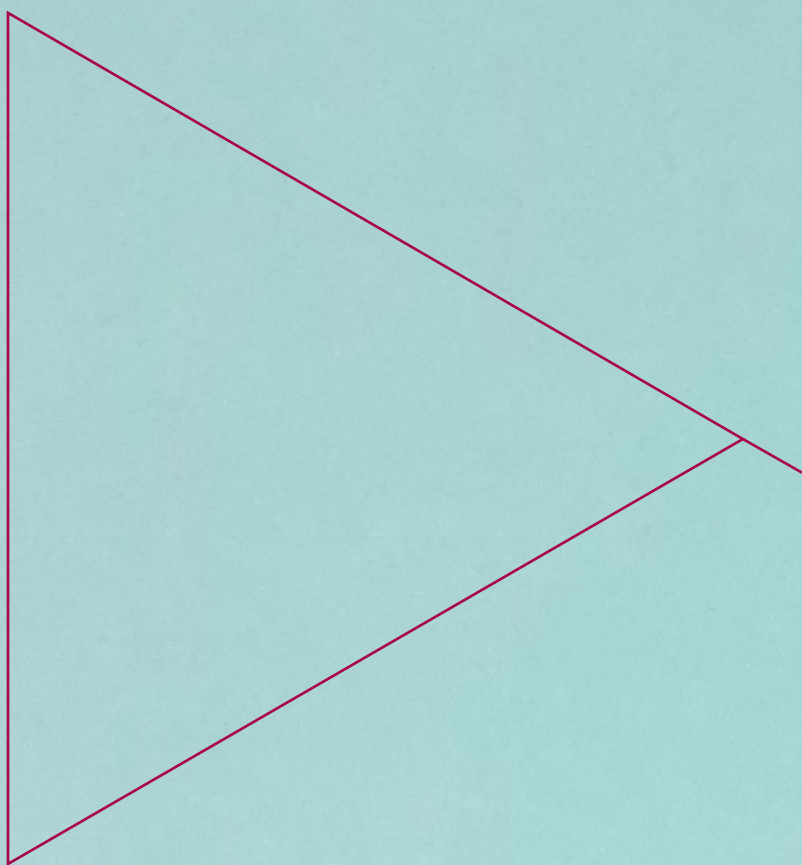
dengan kesejahteraan kolektif dan keamanan orang lain – pandemi telah menunjukkan pentingnya perlindungan sosial. Selain itu, krisis telah menunjukkan bahwa ada ruang lingkup yang signifikan bagi negara-negara untuk mengadopsi pola pikir “apa pun yang diperlukan” untuk mencapai tujuan prioritas jika mereka memilih hal tersebut. Jika pendekatan kebijakan yang sama diterapkan saat pandemi terburuk mereda, cukup menjanjikan untuk mengambil jalan atas demi mencapai TPB dan perlindungan sosial universal.

- Mengambil jalan atas itu membutuhkan pembangunan sistem perlindungan sosial universal yang permanen dengan cakupan yang memadai dan komprehensif untuk semua, dipandu oleh dialog sosial tripartit yang efektif. Sistem ini sangat penting untuk mencegah kemiskinan dan ketimpangan, dan untuk mengatasi tantangan hari ini dan masa depan, khususnya melalui upaya mempromosikan pekerjaan yang layak, mendukung perempuan dan laki-laki dalam mengarungi kehidupan dan transisi pekerjaan mereka dengan lebih baik, memfasilitasi transisi pekerja dan perusahaan dari perekonomian informal ke perekonomian formal, memperkuat transformasi struktural ekonomi, dan mendukung transisi ke ekonomi dan masyarakat yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan.
- Investasi lebih lanjut dalam perlindungan sosial diperlukan saat ini untuk mengisi kesenjangan dalam pembiayaan. Secara khusus, memprioritaskan investasi di landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional sangat penting untuk memenuhi janji Agenda 2030. Ruang fiskal tersedia bahkan di negara-negara termiskin dan mobilisasi sumber daya domestik adalah kuncinya, tetapi dukungan internasional yang terpadu juga penting untuk mempercepat kemajuan di negara-negara yang kekurangan kapasitas fiskal dan ekonomi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dengan investasi yang sangat rendah dalam perlindungan sosial.

- ▶ Perlindungan sosial universal didukung melalui upaya bersama dari badan-badan PBB “bekerja sebagai satu kesatuan”, dan melalui upaya bersama dengan lembaga internasional, regional, subregional dan nasional yang relevan dan mitra sosial, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui Kemitraan Global untuk Perlindungan Sosial Semesta.
- ▶ Jendela kebijakan khusus yang dibuka oleh COVID-19 harus mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan tegas sekarang demi masa depan perlindungan sosial dan mengejar pendekatan kebijakan jalan atas dengan penuh semangat. Melakukan hal itu akan memberdayakan masyarakat untuk menghadapi krisis di masa depan dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan demografis, dunia kerja yang terus berkembang, migrasi, tantangan lingkungan, dan ancaman eksistensial dari perubahan iklim. Pada akhirnya, sistem perlindungan sosial yang kuat akan menopang dan memperbaiki kontrak sosial yang rapuh dan memungkinkan negara-negara untuk menikmati masa depan yang adil secara sosial.

Memajukan keadilan sosial, mempromosikan pekerjaan yang layak

Organisasi Perburuhan Internasional merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dunia kerja. Kami menyatukan pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja untuk mendorong pendekatan berpusat manusia untuk masa depan pekerjaan melalui penciptaan lapangan kerja, hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial.



ilo.org

International Labour Organization

Route des Morillons 4
1211 Geneva 22
Switzerland



International Labour Organization



@ILO



ILOTV